



**FAKTOR DETERMINAN KONFLIK AGRARIA DI DESA SETROJENAR
KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN**

Said Hidayat Putra, Drs. Turtiantoro, M.Si, Dra. Puji Astuti, M.Si.

D2B008070

saidhidavatputra9@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Sudharto, SH, Tembalang, Semarang, 50239

Abstraksi :

Konflik merupakan fenomena yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa konflik dapat terjadi baik pada tataran individu maupun dalam kelompok di dalam masyarakat. Salah satu konflik yang telah terjadi dan sampai saat ini masih berlangsung yaitu konflik antara warga dengan TNI AD di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Fenomena konflik tersebut mencapai titik klimaks pada tanggal 16 April 2011. Seharusnya sebagai warga dan TNI dapat hidup rukun secara bersamaan. Namun fenomena konflik tersebut terjadi mustahil kalau tidak ada penyebabnya. Sebagai langkah awal dalam mencapai tujuan pemecahan konflik, ada baiknya untuk bisa mengetahui faktor determinan atau faktor utama yang menyebabkan konflik tersebut terjadi. Dengan demikian dapat diketahui kunci dari konflik tersebut sehingga upaya penanganannya dapat diketahui secara baik.

A. PENDAHULUAN

Masa reformasi yang berakibat melemahnya kendali militer memperkuat posisi organisasi-organisasi non-pemerintah ataupun kelompok-kelompok kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan kesadaran ini, muncullah berbagai macam ketegangan di seantero nusantara, perpecahan konflik antar suku dan antar petani buruh dan pemilik modal, serta konflik-konflik lainnya.

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. Baik konflik intrapersonal, interpersonal, dan juga konflik antar kelompok merupakan bagian konstitutif dari sejarah manusia. Berbagai macam hal seperti perbedaan selera, perbedaan pendapat, dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Masalahnya adalah, apabila konflik tersebut kemudian terus berlanjut hingga menimbulkan kekerasan.

Kekerasan bagi masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Sejarah mencatat berbagai peristiwa kekerasan sejak zaman pemerintahan raja-raja hingga sekarang Indonesia merdeka di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beberapa peristiwa yang lahir akibat konflik yang termanifestasi menjadi kekerasan dalam beberapa tahun belakangan ini salah satunya adalah konflik sengketa tanah.

Konflik sengketa tanah antara Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dan masyarakat sipil bukanlah fenomena baru untuk dijumpai di negara kita tercinta ini, Indonesia. Pada tahun 2011 kasus sengketa tanah antara TNI dan warga sipil terulang kembali, tepatnya pada tanggal 16 April 2011 yang menyebabkan bentrokan antara TNI dan warga sipil terjadi di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

Bentrokan bermula ketika ratusan warga memblokir akses masuk kompleks Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Dislitbang AD) menggunakan balok kayu dan karung pasir yang dilintangkan di jalan sebelah selatan Pasar Setrojenar. Hal ini dikarenakan warga mengetahui ada Aspam Kasad beserta rombongannya akan berkunjung ke markas Dislitbang. Ketegangan memuncak setelah pembongkaran barikade oleh tentara di lokasi tersebut. Warga yang mengetahui hal tersebut “panas”. Massa yang marah karena melihat keadaan yang demikian melampiaskannya dengan merusak pagar dan gudang senjata dan mendobrak menara tiga lantai di kompleks tersebut. Aksi perusakan inilah yang kemudian tentara melakukan tindakan represif kepada warga.

Isu yang muncul sebagai penyebab dari adanya konflik menurut warga yaitu adanya klaim secara sepihak dari TNI AD bahwa lebar area latihan mereka adalah 500 meter dari garis pantai. Sedangkan warga hanya mengakui lebar latihan TNI yaitu 225 meter. TNI mengklaim pantai tersebut telah menjadi tempat latihan sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Namun warga mengklaim bahwa batas tanah TNI sebenarnya hanya 220 meter dari garis pantai yang dapat dibuktikan dengan adanya patok yang bertuliskan Q222 atau yang sering disebut warga sebagai PAL Budeg.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam konflik agraria antara warga Dengan TNI AD di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Subjek dalam penelitian adalah Kepala Perwakilan Dislitbang TNI AD yaitu Kusmayadi, Mantan Kades Setrojenar yaaitu Mbah Gozali, Perangkat Desa Setrojenar yaitu Suraji, dan tokoh masyarakat yaitu Maksudi. Situs penelitian berkaitan dengan tempat atau wilayah dimana penelitian ini dilakukan. Adapun tempat yang akan dilakukan penelitian yaitu Kantor Perwakilan Dislitbang TNI AD di Desa Setrojenar, Kantor Desa Setrojenar dan wilayah sekitarnya.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur dimana wawancara dimulai dengan beberapa pertanyaan khusus dan selanjutnya sudut pandang masing-masing individu sejalan dengan panggilan lebih lanjut oleh pewawancara, Observasi dengan menggunakan panca indra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk bisa memperoleh informasi , dan Dokumen yaitu pencarian informasi yang dbisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Triangulasi Metode dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. dan Triangulasi Sumber yaitu menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

PEMBAHASAN

Konflik merupakan suatu fenomena yang pasti ada baik pada diri sendiri secara pribadi maupun pada secara kelompok di lingkungan masyarakat. Pernyataan ini tidak terlepas dari pembahasan penelitian mengenai konflik agraria di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Konflik yang terjadi pada tanggal 16 April 2011 hanyalah buntut dari konflik-konflik yang terjadi sebelumnya. Dalam tahapan konflik dikenal adanya konflik laten, konflik yang mulai mengemuka, dan konflik yang telah mengemuka. Tahapan ini yang mampu menerangkan bagaimana proses dalam konflik terjadi sehingga dapat menjawab mengenai pokok pertanyaan penulis yaitu apa yang menjadi faktor determinan dalam konflik tersebut.

1. Kronologi Konflik 16 April 2011

Adanya konflik antara warga dengan TNI pada tanggal 16 April 2011 merupakan titik puncak atau klimaks dari konflik-konflik sebelumnya. Tepatnya pada tahun 2009 isu perjuangan tanah muncul dengan kuat. Hal ini dilakukan warga Setrojenar untuk berusaha memperjuangkan tanah yang dianggap sebagai haknya. Warga berusaha melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPRD Kebumen untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah Kabupaten Kebumen dan TNI. Kurang lebih audiensi dilakukan selama empat kali. Namun dalam perjalanannya pihak pemerintah daerah Kabupaten Kebumen belum sanggup memutuskan tuntutan warga. Hal ini karena pihak pemda tidak berwenang memutuskan. Akhirnya pada tanggal 14 Mei 2009 untuk mendamaikan warga yang berdemo, pemerintah melakukan konsolidasi dengan menyatakan selama belum ada kejelasan status tanah di kawasan TNI maka tanah tersebut harus dalam status qou. Artinya TNI tidak boleh latihan dan sebaliknya warga tidak boleh bertani pula. Kesepakatan ini terjadi pada tahun 2009 atas keputusan Bupati Kebumen saat itu, K.H. Nasirudin.

Kesepakatan akan status qou lahan yang dipermasalahkan oleh masyarakat ternyata terjadi pelanggaran. Menurut pengakuan Musiono, anggota TNI, warga justru dalam masa ini menanam tanaman keras berupa kelapa. Hal ini membuat TNI bersikap untuk bisa melakukan latihan militer. Akhirnya terdengar kabar oleh warga bahwa TNI akan melakukan latihan menembak. Adanya isu tersebut membuat warga terkejut dan resah. Untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut secara langsung, warga beramai-ramai mendatangi kantor Dislitbang TNI. Warga “menggruduk” kantor tersebut dengan masa sekitar 400 orang. Kedatangan warga ini disambut oleh Kepala Dislitbang TNI AD Mayor Infanteri Kusmayadi. Warga menyuarakan aspirasinya menolak kegiatan TNI yang melakukan latihan menembak. Namun isu tersebut dibantah oleh Danramil Buluspesantren. karena apabila TNI akan melakukan latihan maka sebelumnya akan dikirim surat resmi yang disampaikan kepada Muspika dan pihak desa.

Melihat masa yang begitu banyaknya membuat unsur Muspika yaitu Kapolsek Buluspesantren, AKP Sudarmo; Danramil Buluspesantren, Lettu Infanteri Suyadi; Camat Buluspesantren Soddikin, S.Sos. dan Sekcam Buluspesantren Achmad Ngaisom, S.Sos. berusaha menentramkan masa. Akhirnya sejumlah perwakilan warga diajak berdialog diantaranya dari perwakilan pengurus Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) Paryono, Kadus IV Desa Setrojenar Suraji, Kaur Umum Desa Setrojenar Imam Zuhdi, BPD Setrojenar Marsino, tokoh masyarakat Sugeng, serta Kepala Desa Setrojenar Surip Supangat. Dialog tersebut berlangsung selama dua jam yaitu mulai pukul 20.00 – 22.00 W.I.B. Warga melakukan aksi tersebut secara tertib.

Kronologi kejadian aksi yang berbuntut pecahnya tragedi 16 April 2011 dapat dijelaskan melalui dokumen Surat Kepala Perwakilan Laboratorium No. R/10/IV/2011 tanggal 18 April 2011 tentang pengaduan tindak pidana pengrusakan Fasilitas TNI Markas Perwakilan Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren yang disertai satu bendel foto aksi pengrusakan.

Kronologi kejadian dimulai pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 mulai pukul 19.00 WIB terjadi kosentrasi masa di depan Markas Perwakilan Laboratorium Dislitbang dengan alasan menolak kegiatan menembak Meriam 105 mm yang direncanakan di lapangan tembak di wilayah Desa Setrojenar sebagai tempat *stelling*. Masa melengkapi diri dengan senjata tajam (Parang, Kampak, Bambu runcing, Sabit, dan lain-lain). Selanjutnya masa membuat rintangan disebelah selatan jalan menuju pantai dengan tumpukkan pasir, pohon yang ditebang. Kemudian masa membuat rintangan ke utara tepatnya disebelah selatan pasar tradisional Setrojenar dengan balok kayu dan bambu yang ditebang.

Pada hari Senin tanggal 11 April 2011 mulai pukul 07.00 masa sudah berkonsentrasi, sebagian menurunkan ban bekas yang diangkut dengan Kijang Pick Up dan selanjutnya diturunkan d depan pintu masuk Markas Perwakilan Laboratorium Dislitbang, sebagian orasi dengan teriakan-teriakan berbau penghinaan, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan dan menyerang kehormatan terhadap Institusi TNI. Pada pukul 09.00 WIB masa mulai membakar ban bekas di depan pintu gerbang, memasang spanduk penolakan kegiatan latihan TNI DI Urut Sewu. Pada pukul 18.10 WIB, rombongan Danrem masuk untuk menarik meriam.

Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011, Aspam Kasad beserta rombongan meninjau ke Markas Perwakilan Dislitbang. Selanjutnya pada pukul 12.00 WIB, rombongan Aspam Kasad meninggalkan Markas Perwakilan menuju Ambal. Pada pukul 12.30 WIB, masa memasang blokade karung pasir dan balok kayu di jalan sebelah selatan Pasar Setrojenar. Selanjutnya masa bergerak ke utara untuk merobohkan Gapura disamping Kantor Kecamatan Buluspesantren.

Kemudian warga kembali ke arah Selatan untuk melakukan pengrusakan terhadap gudang bekas amunisi meliputi penghancuran pagar depan dan genteng serta pembakaran bagian dalam gudang; merusak pintu-pintu gudang Kendali dan pembakaran dalam gedung; Portal depan Dislitbang; kawat penahan antena tv depan penjagaan ditarik sehingga roboh dan rusak.

Melihat aksi anarkis warga yang terus berlanjut mengakibatkan TNI mengeluarkan pasukanya yang telah berjaga dari Batalyon 49 Yogyakarta untuk meredam aksi anarkis masa dengan tembakan peringatan dan peluru karet. Mengetahui hal tersebut, warga sangat terkejut karena ketika brifing sebelum demo pihak provokator memberikan aba-aba bahwa TNI tidak berani menembak.akhirnya warga lari berhamburan berusaha melarikan diri dari lokasi konflik sehingga aksi anarkis warga berhenti.

2. Faktor Penyebab Konflik

a. Upaya Menguasai Lahan

Sebelum konflik antara TNI dengan warga terjadi, dahulu yaitu sampai tahun 1995 belum ada tanaman di area kawasan pesisir Desa Setrojenar. Istilahnya masih “brangah” atau terlantar, tanah masih marjinal belum ada yang memanfaatkan untuk pertanian. Pada tahun 1995 di kawasan selatan Kabupaten Kebumen kedatangan orang dari daerah Jawa Barat yaitu dari Kabupaten Majalengka. Orang tersebut datang ke wilayah ini bertujuan untuk menanam salah satu jenis pertanian yaitu tanaman

Semangka. Pertama kali pertanian Semangka dilakukan di daerah Kecamatan Ambal hingga berkembang sampai Kecamatan Buluspesantren

Setelah warga mengetahui bahwa lahan pesisir sangat produktif yang dampaknya dapat meningkatkan perekonomian petani, akhirnya warga yang merasa memiliki lahan didaerah tersebut ingin berusaha memperluas lahan pertaniannya sampai selatan pesisir pantai. Hal ini dapat dikatakan muncul rasa ketidakpuasan akan luas area pertanian yang selama ini warga garap. Karena dengan memiliki lahan pertanian yang semakin luas maka, perekonomian mereka akan semakin meningkat pula. Dari sinilah mulai muncul upaya klaim tanah milik warga

b. Masalah Patok Pengaman

Pada awalnya sebelum TNI melakukan latihan militer, pemberitahuan zona aman hanya dilakukan dengan memberikan bendera merah yang dikibarkan dengan sebuah tiang. Sehingga warga yang melihat simbol itu telah menyadari bahwa TNI sedang melakukan latihan. Dengan demikian warga tidak berani memasuki area selatan bendera tersebut. Langkah TNI tersebut terbukti efektif sebagai alat pemberitahuan warga bahwa TNI sedang latihan.

Memasuki tahun 1997 penggunaan bendera sebagai alat pemberitahuan warga bahwa TNI sedang latihan telah ditiadakan. Karena TNI melakukan batas pengaman / zona pengaman menggunakan patok beton yang ditanam di tanah. Patok ini ditanam dengan kedalaman kurang lebih satu meter. Dari patok ini lah menurut warga yang menyebabkan konflik mulai terjadi. Pematokan oleh TNI dilakukan berdasarkan dari dokumen yang telah dibuat pada tahun 1982 yaitu Surat Inspeksi IPEDA Magelang tanggal 12 Juli 1982 S.1.085/Wpj.05/Kl.1807/1982. Surat ini menjelaskan jarak latihan TNI ialah 500 meter dari bibir pantai ke utara.

Warga desa Setrojenar yang melihat adanya patok yang dipasang oleh TNI sebagai patok zona pengaman disalahpersepsikan oleh warga. Warga menganggap patok ini merupakan cara TNI untuk menguasai lahan pertanian warga. Warga menuding TNI bahwa TNI akan melakukan penyerobotan lahan warga.

c. Kepemimpinan Seno

Awal mula yang menjadi faktor konflik yaitu semasa kepemimpinan Pak Seno selaku kepala Dislitbabang TNI AD yang hanya berlangsung masa jabatannya sekitar 3 tahun, sampai tahun 2005. Konflik yang timbul karena ketidaksenangan warga terhadap perlakuan Seno terhadap petani semangka di wilayah selatan Setrojenar.

Warga yang bertani diatas lahan latihan TNI dari nara sumber yang ada yaitu bercocok tanam semangka. Warga yang akan memanen hasil pertaniannya yaitu berupa semangka membawa kendaraan sebagai sarana pengangkut hasil pertanian tersebut. Sebelum tiba di lokasi pemanenan warga tersebut harus berhenti untuk menyerahkan SIM maupun STNK. Tujuannya adalah sebagai jaminan untuk agar setelah memanen semangka warga tersebut harus kembali untuk mengambil STNK dan sekaligus diminta menyetorkan hasil panen semangka tersebut. Hal ini oleh warga bisa dinamakan seperti upeti.

d. Kepemimpinan Nur Hidayat

Pengakuan dari mantan Kepala Desa Streojenar, mbah Gozali bahwa konflik dimulai dari adanya kepemimpinan mantan kepala desa yaitu Pak Nur Hidayat. Konflik dimulai ketika mantan kades tersebut mempermasalahkan mengenai status tanah di latihan TNI AD. Mantan kades tersebut berdalih bahwa tanah yang digunakan TNI AD adalah tanah desa. Oleh karena itu, desa Setrojenar berhak atas pungutan sewa yang dilakukan oleh TNI AD.

3. Faktor Determinan Konflik

Dari beberapa faktor-faktor penyebab konflik antara warga dengan TNI, maka dapat ditarik benang merah konflik tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti yang menjadi faktor determinan atau utama penyebab konflik tersebut.

Bermula dari kesaksian mantan kades yang telah mengetahui riwayat tanah mulai batas tanah desa hingga proses dalam pembentukan area latihan TNI selebar 500 meter beserta dokumen-dokumennya yang telah disahkan dapat dijadikan sebagai pegangan yang sah/legal. Proses pemutusan area latihan TNI dengan lebar 500 meter telah resmi dan sah secara hukum.

Namun hal tersebut diatas merupakan hasil dari konflik yang berkepanjangan yang tiada henti-hentinya bahkan hingga keputusan telah ditetapkan. Namun inilah fakta yang ada yang setidaknya dapat menjelaskan batas tanah negara dan tanah rakyat dengan jelas. Namun kembali keawal, proses tersebut terjadi akibat adanya konflik antara warga dengan tentara di lokasi penelitian.

Konflik yang dipicu mulai faktor penguasaan lahan, kepemimpinan dari pihak TNI dan desa, serta masalah patok pengaman. Faktor-faktor tersebut apabila dikaji menjadi satu kesatuan dapat ditarik benang merah yang akan memberikan jawaban mengenai faktor determinan konflik antara warga dengan TNI AD di Desa Setrojenar.

Dimulai dari hubungan warga dengan TNI yang harmonis pada era 1970-an. Mulai dari pembangunan koramil tahun 1975 dan Dislitbang TNI AD yang selesai dibangun tahun 1986. Tahun-tahun tersebut sebagai awal mula dari menetapnya TNI di lingkungan Desa Setrojenar. Keberadaan TNI ini sangat di dukung desa dan warga karena wilyahnya menjadi kondusif.

a. Fase Konflik Laten

Konflik antara warga dan TNI di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren diakibatkan oleh individu-individu dimasing-masing pihak baik dari TNI maupun dari warga. Bermula dari area pantai selatan Setrojenar yang mulai bisa dimanfaatkan untuk pertanian yang kemudian TNI melakukan pematokan sebagai batas pengaman belumlah memunculkan konflik secara terbuka atau mengemuka. Namun disini telah muncul konflik laten karena ketegangan yang ada belum sepenuhnya mengemuka dan belum mencapai eskalasi yang menempatkan para pihak dalam polarisasi yang tajam. Warga masih berperasangka baik terhadap TNI, namun tidak menutup kemungkinan warga yang memiliki prasangka yang negatif, mengingat pematokan tanah seolah-olah seperti pembatas kepemilikan tanah. Warga yang demikian sudah timbul rasa kecurigaan, kekawatiran, dan ketegangan didalam diri sendiri.

b. Konflik Mulai Mengemuka

Memasuki tahun 2004 dimana Pak Seno merupakan Kepala Dislitbang saat itu menerapkan sewa untuk tanah dan pajak hasil bumi berupa penyerahan hasil panen pertanian diarea kawasan latihan TNI konflik belumlah muncul. Keadaan ini menambah rasa ketidak senangan warga setelah sebelumnya melakukan pematokkan. Hal ini menambah akumulasi konflik laten yang telah ada didalam benak warga. Namun dari sinilah konflik akan muncul ketika Kepala Desa Setrojenar waktu itu dipimpin oleh Pak Nur Hidayat mengklaim bahwa tanah TNI tersebut dalah tanah desa sehingga kades tersebut meminta bagian hasil dari sewa tanah pertanian. Dari sinilah muncul niat keserakahan untuk bisa menguasai secara keseluruhan tanah pertanian. Warga akhirnya diprovokasi untuk memusuhi TNI. Dari sinilah konflik telah mulai mengemuka karena pihak telah dapat diidentifikasi, para pihak telah menyadari ada persoalan diantara

mereka yang perlu diselesaikan, masalah-masalah yang menjadi perselisihan telah dapat diidentifikasi. Konflik seperti ini sangat potensial mencapai eskalasi dan menimbulkan tindak kekerasan. Akhirnya tahun 2005 Pak Seno dipindahtugaskan di Bandung.

Pandangan buruk warga terhadap TNI telah membuat warga mudah untuk diprovokasi. Akhirnya, seperti didalam teori konflik yang menjelaskan konflik akan meluas dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Dalam kondisi ini Ketika beberapa orang dengan kepentingan laten (tidak disadari) yang sama saling bercakap-cakap, maka kepentingan laten mereka sering kali muncul ke kesadaran. Setelah merasa yakin dengan pendirian masing-masing mereka mungkin akan mulai mengembangkan aspirasi baru, yang dapat mengarah ke konflik dengan orang lain yang kepentingannya bertentangan dengan aspirasi tersebut. Konflik semacam itu terutama akan muncul bila mereka mulai mengidentifikasi diri sebagai kelompok yang terpisah dengan kelompok lainnya. Aspirasi yang sama tersebut kemudian berubah menjadi norma kelompok, dan kepemilikan aspirasi tersebut menjadi manifestasi kesetiaan terhadap kelompok. Hasilnya dapat disebut *struggle group*.

Akibat Pak Seno yang pernah melakukan pungutan liar dan ditambah dengan rasa curiga warga terhadap patok TNI menyebabkan warga berpandangan bahwa TNI lah yang menguasai tanah, sehingga ketika TNI melakukan pematokkan maka oleh warga TNI dinilai ingin menyerobot lahan warga. Padahal hal ini hanyalah sebagai patok pengaman. Namun karena sikap stereotip buruk warga terhadap TNI membuat warga tidak percaya akan semua penjelasan dari TNI. Mulai dari sinilah isu perjuangan tanah muncul. TNI diklaim oleh warga telah melakukan penyerobotan tanah warga. Inilah yang memunculkan konflik agraria di desa tersebut.

c. Konflik Telah Mengemuka

Perjuangan warga yang dianggap sebagai aksi untuk membela keadilan akan haknya terhadap tanah di kawasan selatan membuat warga sering melakukan unjuk rasa baik di area Dislitbang maupun di DPRD kebumen. Dalam keadaan ini para pihak menyadari adanya perselisihan dan juga telah mulai melakukan komunikasi atau pembicaraan atau negosiasi diantara mereka, tetapi upaya pembicaraan dan negosiasi yang ada telah menemui jalan buntu, sehingga diperlukan kehadiran pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencari penyelesaiannya.

Akhirnya pemerintah Kabupaten Kebummen selaku pihak penengah dalam konflik tersebut memberikan jalan tengah untuk audiensi antara warga dengan TNI di gedung DPRD. Namun tidak terjadi titik temu yang memuaskan karena masing-masing pihak tetap teguh pada pendiriannya. Akhirnya Bupati saat itu Pak Nasirudin membuat kesepakatan yang intinya selama status tanah belum jelas maka kedua belah pihak tidak ada yang boleh menggunakan lahan sengketa tersebut. Masa ini bisa dikatakan status quo. Dalam masa ini konflik mulai mereda

Dalam masa status quo dalam perjalannya terjadi pelanggaran. Warga menilai TNI telah melanggar dengan melakukan latihan. TNI menilai warga juga telah melanggar dengan menanam lahan sengketa tersebut dengan tanaman keras. Hal ini membuat saling tuding diantara keduanya yang mengakibatkan hubungan antara TNI dengan warga kembali memanas. Hal ini membuat warga melakukan aksi blokade jalan ketika mendengar ada isu latihan militer. Warga yang panas melihat TNI yang mencoba untuk membuka blokade walupun dikembalikan lagi seperti semula namun warga "panas". Akhirnya warga melakukan aksi anarkisnya dengan merusak fasilitas negara. Untuk meredam aksi anarkis warga akhirnya TNI melakukan langkah represif.

Akibat adanya konflik pada tanggal 16 April 2011, membuat pemerintah bertindak tegas atas status tanah negara dengan tanah desa/warga. Pada tahun 2012 BPN Propinsi Jawa Tengah melakukan pengukuran dan menetapkan sertifikat tanah TNI dengan lebar 500 meter serta panjang sekitar 22,5 km. Keputusan ini telah bersifat final yang telah menjelaskan antara tanah warga dengan tanah TNI.

Telah jelasnya putusan pemerintah tentang batas tanah warga dengan tanah TNI menjadikan TNI memasang pagar pembatas tanah warga dengan tanah TNI. Pemagaran ini oleh sebagian masyarakat ditentang keberadaannya. TNI menyatakan bahwa pemagaran ini hanya sebagai batas pengaman yang jelas. Ketika terjadi latihan militer, warga dilarang melewati pagar pembatas tersebut karena demi upaya keselamatan warga.

Warga tetap ada yang menolak penjelasan dari TNI mengenai fungsi dari pemagaran tanah TNI dengan tanah warga. Warga menganggap lahan yang terdapat disebelah selatan telah dikuasai TNI. Warga mengkuatirkan tidak bisa menanam tanaman pertanian di sebelah selatan TNI. Namun anggapan warga ini terlalu melebih-lebihkan dari kenyataan yang ada di lapangan.

TNI membuat pagar pembatas bukan berarti warga dilarang menanam di lokasi latihan TNI. Warga masih dipersilahkan untuk menanami tanah di wilayah selatan pagar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pintu masuk yang lebar untuk bisa petani lewati. Pintu tersebut berukuran 2x2 meter dengan jarak antara pintu yang satu dengan yang lainnya 25 meter. Sehingga pemagaran tidak dilakukan secara tertutup yang bisa menghalangi aktifitas petani.

Resiko yang dihadapi warga apabila menanam tanaman di selatan pagar pembatas tanah TNI dengan warga yaitu apabila terjadi kerusakan karena peluru atau mortir atau yang disebabkan latihan TNI , maka warga tidak berhak menuntut ganti rugi. Namun sebaliknya, apabila TNI dalam latihannya menimbulkan kerusakan pada lahan pertanian warga yang berada di sebelah utara pagar pembatas tersebut maka TNI berkewajiban membayar ganti rugi sebesar kerugian petani.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa konflik antara warga dan TNI di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren diakibatkan oleh adanya perbedaan persepsi lapangan latihan TNI dalam penggunaan wilayah pantai. Petani dalam penggunaan lapangan tersebut bertujuan agar dapat ditanami sampai batas PAL Budeg. Sedangkan TNI memiliki kepentingan untuk menambah lebar area latihan TNI 500 meter dari bibir pantai. Konflik mulai muncul ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai patok pengaman TNI yang dianggap warga sebagai usaha perampasan tanah. Dan konflik mulai membesar karena adanya pungutan sewa lahan oleh oknum TNI dan provokasi dari oknum warga. Sehingga muncullah fenomena perjuangan tanah. Upaya penyelesaian konflik antara warga dengan TNI belum final dan belum menemukan titik terang karena terjadinya kekakuan diantara pihak-pihak yang berkonflik sehingga sulit dipertemukan untuk dilakukan perundingan.

Perlu adanya upaya dari masing-masing kedua belah pihak baik dari warga Desa Strojenar terutama tokoh desa maupun dari TNI serta pemerintah Kabupaten Kebumen

untuk menciptakan keadaan yang tidak kaku sehingga ruang komunikasi antar pihak-pihak yang terkait dapat berlangsung secara baik tanpa adanya prasangka yang buruk antar pihak-pihak yang terkait. Hubungan warga dengan TNI di Desa Setrojenar yang berlangsung disharmonis perlu dikembalikan lagi ke kondisi sebelumnya yang pernah hidup berdampingan secara harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomia Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sumardjono, Maria S.W. 2006. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindoPersada.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Pruit, Dean G dan Jeffrey Z. 2004. Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Fera, dkk. 2004. *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*. Salatiga: Pustaka Percik.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Hendricks, William. 2008. *Bagaimana Mengelola Konflik, Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Utman, Sabian. 2007. *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan, Sebuah Penelitian Sosiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Affandi, Hakimul Ikhwan. 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Mukhsin, Jamil M. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai, Teori, Strategi, dan Implimentasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Meditation Center.
- Ms, Wahyu. 1986. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Wahyu, Ramdani. 2007. *ISD, Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salmi, Jamil. 2003. *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru dalam Melihat Hak-Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Bosdakarya.

Chalid, Hambali. 2012. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: kencana prenatal media.

Non-Buku

http://eprints.undip.ac.id/24116/1/FITRIA_SRIYANI.pdf diunduh tanggal 28 Juni 2011 pukul 21.05 W.I.B.

<http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/173832312201008201.pdf> 06.45 diunduh tanggal 10 Mei 2011, pukul 21.35 W.I.B.

http://benyahya.student.umm.ac.id/download-as-pdf/umm_blog_article_184.pdf diunduh tanggal 10 Mei 2011, pukul 21.45 W.I.B

<http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diunduh tanggal 7 September 2014, pukul 20.37 W.I.B

http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ekma5104/5104%20jadi/fmenu_4.3.3.htm, diunduh tanggal 7 September 2014, pukul 22.03 W.I.B

<http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/288-metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>, diunduh tanggal 7 September 2014, pukul 21.39 W.I.B

<http://megapolitan.kompas.com/read/2011/04/27/0740544/twitter.com>, diunduh pada tanggal 08 September 2014, pukul 19.48 W.I.B